

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN JENEPONTO
MENURUT PENGELUARAN

2013-2017



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN JENEPONTO MENURUT PENGELUARAN
2013-2017**

<https://jenepontokab.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN JENEPONTO
MENURUT PENGELUARAN 2013-2017**

Katalog BPS : 9302020.7304
No. Publikasi : 73045.1802
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : viii + 51 halaman

Naskah/Grafik:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Gambar Kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

H. Mukrabin, SE, MM.

Penyunting:

Suryati Setram, SE.

Penulis:

Isna Muflichatul Fadhillah, SST.

Pengolah Data:

Isna Muflichatul Fadhillah, SST.

Gambar Kulit:

Isna Muflichatul Fadhillah, SST.

<https://jeneponteknops.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt, di mana berkat karunia-Nya maka Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto dapat menyelesaikan publikasi “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jeneponto Menurut Pengeluaran 2013-2017”.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini telah menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008*. Dengan demikian, melalui data PDRB ini diharapkan kita dapat mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi sekaligus membuat perencanaan yang lebih baik dan tepat guna di masa yang akan datang.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam membantu penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jeneponto, Agustus 2018

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Jeneponto,**

H. Mukrabin, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	5
II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT)	10
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT)	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
2.5 Perubahan Inventori (PI)	20
2.6 Ekspor - Impor	23
III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN JENEPONTO MENURUT PDRB PENGELUARAN 2013 - 2017	24
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	25
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	33
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah tangga	33
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	35
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	36
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	39
3.2.5 Perubahan Inventori	40
3.2.6 Ekspor Barang dan Jasa	41
3.2.7 Impor Barang dan Jasa	42
IV. PENUTUP	44
V. LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	26
Tabel 2.	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	27
Tabel 3.	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	29
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	30
Tabel 5.	Laju Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	32
Tabel 6.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	34
Tabel 7.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	35
Tabel 8.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	37
Tabel 9.	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	39
Tabel 10.	Perkembangan Perubahan Inventori, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	40
Tabel 11.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	42
Tabel 12.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	43

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1.	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	26
Grafik 2.	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	27
Grafik 3.	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	28
Grafik 4.	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	30
Grafik 5.	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017	31

I *BAB I*

PENDAHULUAN

<https://jenepontokab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat.

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB di antaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai Tahun Dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan yaitu:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB Tahun Dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 di antaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contohnya nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*basic price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

II BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://jenepontokab.bps.go.id>

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat)
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain.
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Non Profit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku;
5. Susun indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumahtangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = & \text{Output} - \\ & \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ & \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ & \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan.
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in Kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

<https://jenepontokab.bps.go.id>

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sebagai berikut:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : $\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga Konstan (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

<https://jenepontokab.bps.go.id>

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS;
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun seringkali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

III BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN
JENEPONTO MENURUT PDRB PENGELUARAN
2013 -2017

<https://jenepontokab.bps.go.id>

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Jeneponto atas dasar harga berlaku selama periode 2013-2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 meningkat sebesar 64,06%, yakni dari 5.269,41 miliar Rupiah di tahun 2013 menjadi 8.645,02 miliar Rupiah di tahun 2017. Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, maka peningkatan ini lebih rendah, yakni dari 4.422,90 miliar Rupiah menjadi 5.967,18 miliar Rupiah, atau meningkat sebesar 34,92%.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung fluktuatif, perekonomian Kabupaten Jeneponto periode 2013-2017 dapat tetap tumbuh di atas 6%, yakni sebesar 6,64%; 7,93%; 6,54%; 8,37%; dan 8,26%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Pertambangan dan Penggalian dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 12,93% per tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, perekonomian Kabupaten Jeneponto didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2013-2017 PDRB Kabupaten Jeneponto atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 5.269,41 miliar Rupiah (2013); 6.155,88 miliar Rupiah (2014); 7.001,19 miliar Rupiah (2015), 7.872,79 miliar Rupiah (2016), dan 8.645,02 miliar Rupiah (2017). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Jeneponto pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

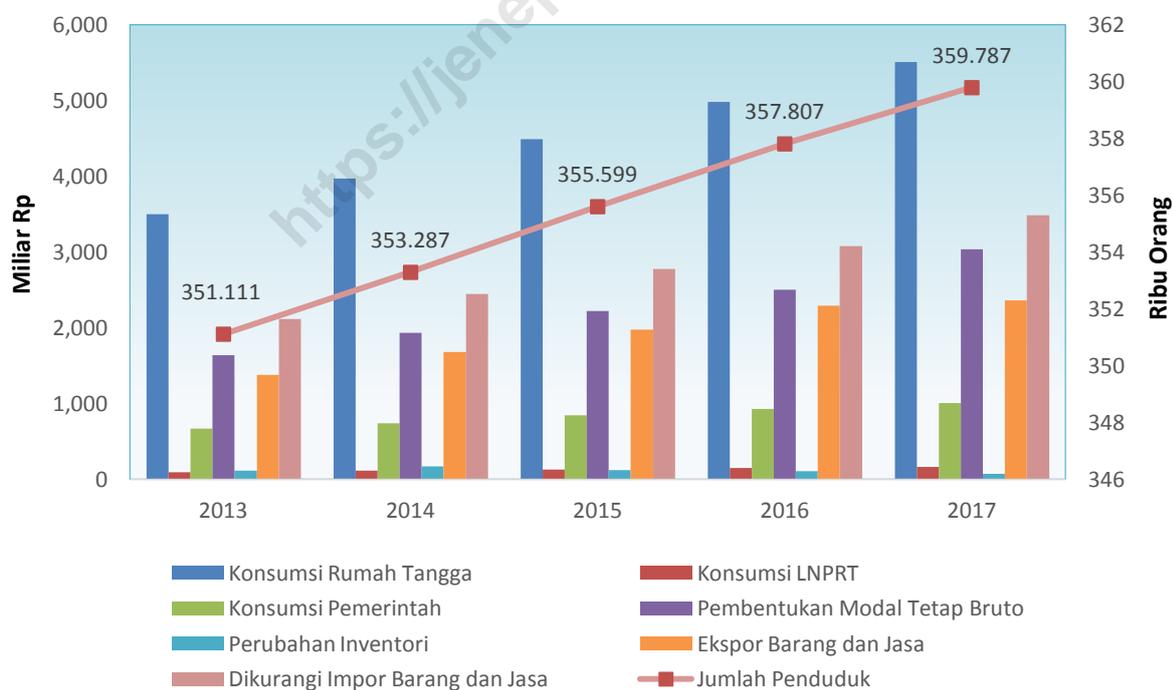
Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.500,05	3.970,41	4.489,32	4.979,14	5.504,46
2. Konsumsi LNPRT	92,22	112,81	130,25	145,79	160,04
3. Konsumsi Pemerintah	665,75	739,10	840,62	927,01	1.002,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.640,07	1.934,36	2.219,84	2.501,08	3.030,42
5. Perubahan Inventori	110,22	166,67	120,34	108,75	70,13
6. Ekspor Barang dan Jasa	1.376,05	1.679,60	1.973,59	2.290,32	2.360,10
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2.114,94	2.447,08	2.772,77	3.079,30	3.482,56
PDRB	5.269,41	6.155,88	7.001,19	7.872,79	8.645,02

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga).

PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Jeneponto pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017

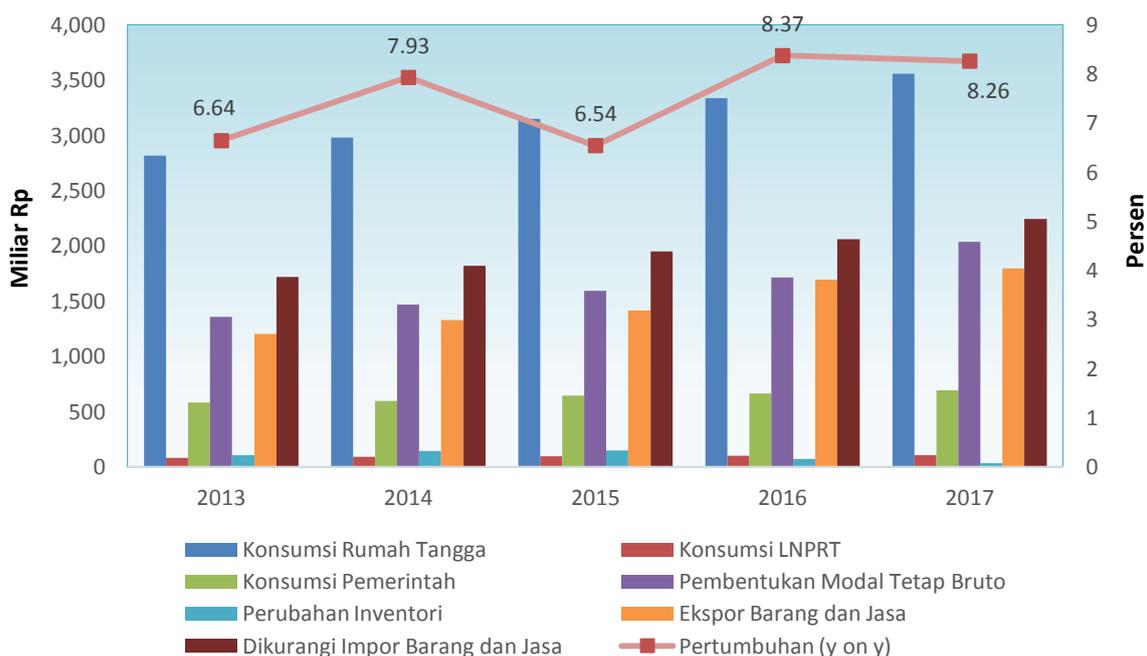
(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.817,44	2.977,76	3.148,72	3.337,24	3.557,23
2. Konsumsi LNPRT	81,19	89,53	93,11	96,97	101,53
3. Konsumsi Pemerintah	582,79	596,37	640,96	661,22	690,25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.356,85	1.464,64	1.591,71	1.710,80	2.035,32
5. Perubahan Inventori	102,48	140,13	147,95	71,22	30,39
6. Ekspor Barang dan Jasa	1.200,34	1.325,29	1.411,68	1.695,45	1.792,31
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.718,20	1.820,08	1.948,22	2.061,12	2.240,38
PDRB	4.422,90	4.773,64	5.085,92	5.511,79	5.967,18

Catatan: ^{*)} angka sementara

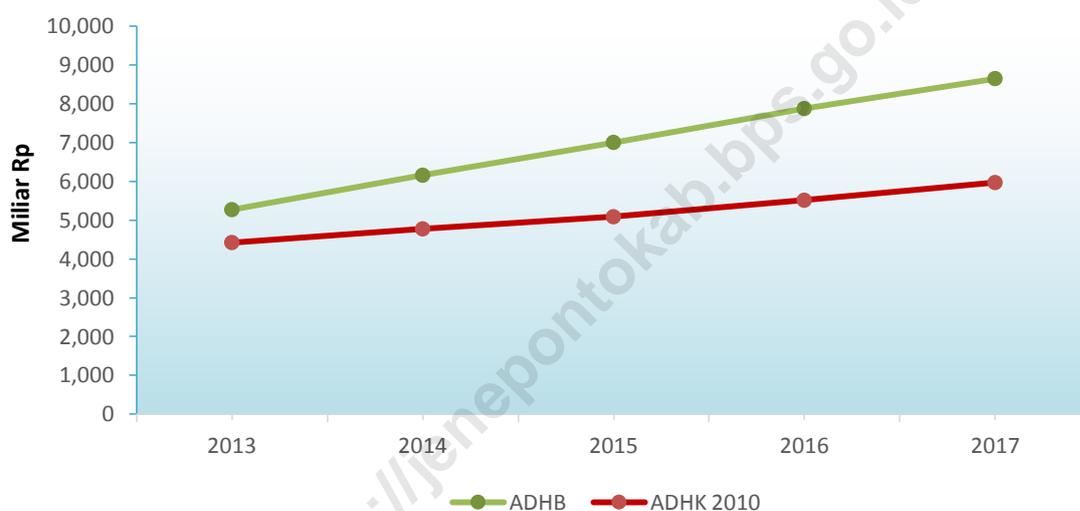
^{**)} angka sangat sementara

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017



Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Jeneponto menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yakni sebesar 4.422,90 miliar Rupiah (2013); 4.773,64 miliar Rupiah (2014); 5.085,92 miliar Rupiah (2015); 5.511,79 miliar Rupiah (2016); dan 5.967,18 miliar Rupiah (2017). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto cenderung fluktuatif namun mengalami peningkatan, yakni dari 6,64 persen pada tahun 2013 menjadi 8,26 persen pada tahun 2017.

Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), dan Ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017

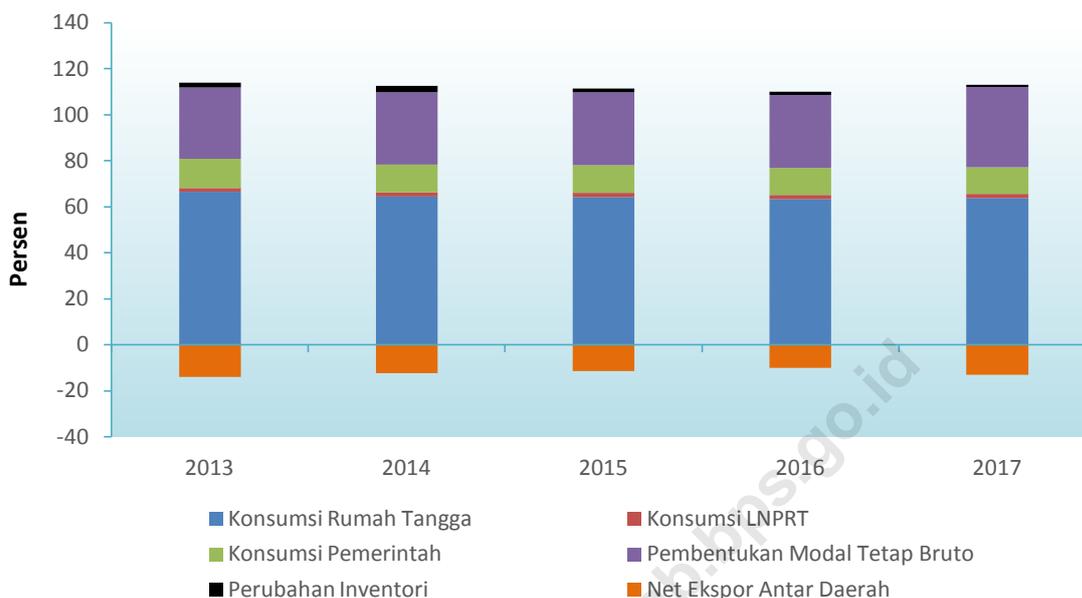
(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	66,42	64,50	64,12	63,24	63,67
2. Konsumsi LNPRT	1,75	1,83	1,86	1,85	1,85
3. Konsumsi Pemerintah	12,63	12,01	12,01	11,77	11,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,12	31,42	31,71	31,77	35,05
5. Perubahan Inventori	2,09	2,71	1,72	1,38	0,81
6. Ekspor Barang dan Jasa	26,11	27,28	28,19	29,09	27,30
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	40,14	39,75	39,60	39,11	40,28
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: ^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kabupaten Jeneponto sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (di atas 60 persen). Besarnya porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut merupakan faktor pendorong utama besarnya permintaan barang dan jasa. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 31,12 persen sampai dengan 35,05 persen. Adapun proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 11,60 persen sampai dengan 12,63 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, perdagangan antar wilayah menunjukkan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai impor sehingga net ekspor menunjukkan angka yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

**Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Jeneponto 2013-2017**



**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Jeneponto 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,80	5,69	5,74	5,99	6,59
2. Konsumsi LNPRT	11,90	10,27	4,00	4,14	4,70
3. Konsumsi Pemerintah	4,76	2,33	7,48	3,16	4,39
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,27	7,94	8,68	7,48	18,97
5. Perubahan Inventori ^{***)}	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	9,94	10,41	6,52	20,10	5,71
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	5,35	5,93	7,04	5,79	8,70
PDRB	6,64	7,93	6,54	8,37	8,26

Catatan: ^{*)} angka sementara

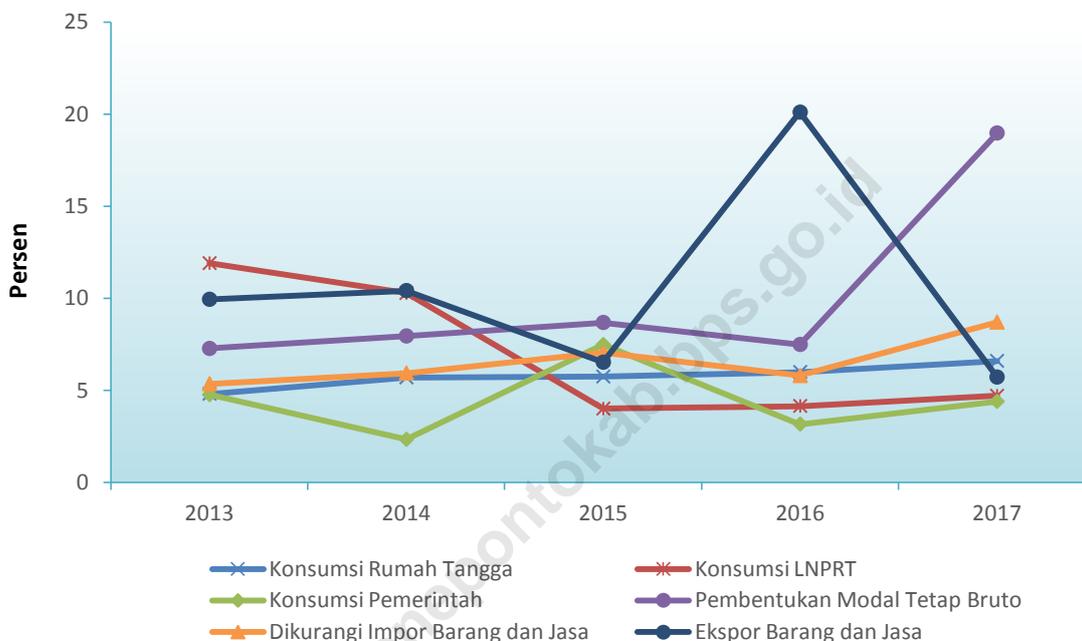
^{**)} angka sangat sementara

^{***)} laju pertumbuhan tidak ditampilkan

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2013-2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto secara rata-rata mencapai 7,55 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,64 persen (2013); 7,93 persen (2014); 6,54 persen (2015); 8,37

persen (2016); dan 8,26 persen (2017);. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016.

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto 2013-2017



Laju indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya pertumbuhan perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat pertumbuhan kenaikan harga selama periode tahun 2013 - 2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

⁶ Indeks perkembangan

**Tabel 5. Laju Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Jeneponto
2013-2017**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,64	7,33	6,93	4,65	3,71
2. Konsumsi LNPRT	3,34	10,94	11,02	7,48	4,85
3. Konsumsi Pemerintah	5,02	8,49	5,82	6,90	3,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,58	9,26	5,60	4,83	1,85
5. Perubahan Inventori ^{***)}	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	1,52	10,55	10,31	(3,37)	(2,52)
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	7,45	9,23	5,86	4,97	4,05
PDRB	4,68	8,24	6,75	3,76	1,43

Catatan: ^{*)} angka sementara
^{**)} angka sangat sementara
^{***)} laju pertumbuhan tidak ditampilkan

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Jeneponto untuk periode 2013-2017.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Jeneponto, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Jeneponto maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama, dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 – 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan

naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga, Kabupaten Jeneponto 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016 [*]	2017 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.500,05	3.970,41	4.489,32	4.979,14	5.504,46
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.817,44	2.977,76	3.148,72	3.337,24	3.557,23
Proporsi terhadap PDRB (%)	66,42	64,50	64,12	63,24	63,67
Rata-rata konsumsi per-Rumah tangga					
a. ADHB (Ribuan Rp)	43.983,74	49.587,98	55.779,73	61.483,77	67.221,84
b. ADHK 2010 (Ribuan Rp)	35.405,65	37.190,39	39.122,80	41.209,14	43.441,78
Rata-rata konsumsi per-Kapita					
a. ADHB (Ribuan Rp)	9.968,50	11.238,48	12.624,67	13.915,71	15.299,22
b. ADHK 2010 (Ribuan Rp)	8.024,36	8.428,73	8.854,69	9.326,93	9.887,04
Pertumbuhan ⁷					
a. Total konsumsi RT	4,80	5,69	5,74	5,99	6,59
b. Konsumsi Per-RT	4,08	5,04	5,20	5,33	5,42
c. Konsumsi Perkapita	4,08	5,04	5,05	5,33	6,01
Jumlah RT	79.576	80.068	80.483	80.983	81.885
Jumlah Penduduk (Orang)	351.111	353.287	355.599	357.807	359.787

Catatan: ^{*} angka sementara

^{**} angka sangat sementara

Selama periode 2013-2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 66,42 persen (2013); 64,50 persen (2014); 64,12 persen (2015); 63,24 persen (2016); dan 63,67 persen (2017). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 66,42 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 63,24 persen. Menurunnya persentase ini disebabkan karena pada tahun 2016 pengeluaran masyarakat lebih ditujukan untuk investasi atau pembentukan modal yang semakin meningkat.

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013, setiap rumahtangga di Kabupaten Jeneponto menghabiskan dana sekitar 43,984 juta Rupiah per tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 49,588 juta Rupiah (2014); 55,780 juta Rupiah (2015); 61,484 juta Rupiah (2016); dan 67,222 juta Rupiah (2017). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

rata konsumsi per rumah tangga tumbuh pada kisaran 5,01 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,42 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 4,08 persen sampai dengan 6,01 persen.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan sebesar 4,80 persen pada tahun 2013. Kemudian, berturut-turut sebesar 5,69 persen (2014); 5,74 persen (2015); 5,99 persen (2016); dan 6,59 persen (2017). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumah tangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 0,63 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

**Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Kabupaten Jeneponto
2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	92,22	112,81	130,25	145,79	160,04
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	81,19	89,53	93,11	96,97	101,53
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	1,75	1,83	1,86	1,85	1,85
Pertumbuhan (ADHK 2010)	11,90	10,27	4,00	4,14	4,70

Catatan: ^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data di atas menunjukkan hal tersebut, dimana proporsinya terhadap PDRB masih sangat kecil.

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013 konsumsi LNPRT sebesar 92,22 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 112,81 miliar rupiah (2014); 130,25 miliar rupiah (2015); 145,79 miliar rupiah (2016); dan 160,04 miliar rupiah (2017). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 berturut-turut adalah 11,90 persen (2013); 10,27 persen (2014); 4,00 persen (2015); 4,14 persen (2016); dan 4,70 persen (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 terutama karena banyaknya musyawarah, kampanye, dan juga kegiatan-kegiatan lain dalam masa pemilihan umum kepala daerah.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, di mana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

**Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Kabupaten Jeneponto
2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	665,75	739,10	840,62	927,01	1.002,43
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	582,79	596,37	640,96	661,22	690,25
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	12,63	12,01	12,01	11,77	11,60
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	1.896,12	2.092,07	2.363,95	2.590,81	2.786,18
b. ADHK 2010	1.659,85	1.688,06	1.802,48	1.847,98	1.918,50
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	109.570,44	148.056,89	138.373,66	170.971,97	172.654,15
b. ADHK 2010	95.916,72	119.465,14	105.507,82	121.951,31	118.885,64
Pertumbuhan ⁸					
a. Total konsumsi pemerintah	4,76	2,33	7,48	3,16	4,39
b. Konsumsi perkapita	4,03	1,70	6,78	2,52	3,82
c. Konsumsi per-pegawai pemerintah	11,22	24,55	(11,68)	15,59	(2,51)
Jumlah pegawai pemerintah ⁹	6.076	4.992	6.075	5.422	5.806
Jumlah Penduduk (Orang)	351.111	353.287	355.599	357.807	359.787

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 665,75 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 1.002,43 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB terus mengalami penurunan, dari 12,63 persen (tahun 2013) menjadi 11,60 persen (tahun 2017). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2013. Hal ini terjadi karena pada tahun 2017 pengeluaran lebih ditujukan untuk investasi atau pembentukan modal yang semakin meningkat.

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

⁹ Tidak termasuk polisi dan militer

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1.896,12 ribu rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 2.092,07 ribu rupiah (2014), 2.363,95 ribu rupiah (2015), 2.590,81 ribu rupiah (2016), dan mencapai 2.786,18 ribu rupiah pada tahun 2017. Rata-rata konsumsi pemerintah perkapita ini menggambarkan besarnya layanan yang telah diberikan pemerintah kepada setiap penduduk.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,03 persen (2013). Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita yaitu 1,70 persen (2014); 6,78 persen (2015); 2,52 persen (2016); dan 3,82 persen (2017).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 109.570,44 ribu rupiah (2013), kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 148.056,89 ribu rupiah (2014); 138.373,66 ribu rupiah (2015); 170.971,97 ribu rupiah (2016); dan 172.654,15 ribu rupiah (2017).

Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan fluktuasi dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2014 sebesar 24,55 persen, sedangkan tahun 2015 justru mengalami pertumbuhan negatif mencapai 11,68 persen dan pada tahun 2017 negatif 2,51 persen. Sementara itu, jumlah pegawai pemerintah mengalami fluktuasi pada periode tahun 2013-2017 dengan jumlah pada masing-masing tahun 6.076 orang (2013); 4.992 orang (2014); 6.075 orang (2015); 5.422 orang (2016); dan 5.806 orang (2017).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Secara total, pertumbuhan konsumsi pemerintah rata-rata mencapai 4,42 persen per tahun pada periode 2013-2017.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹⁰. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. PMTB Kabupaten Jeneponto menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Lebih dari 30 persen pembentukan PDRB pengeluaran berasal dari komponen PMTB ini, dan proporsinya juga terus meningkat setiap tahunnya. Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 – 2017 berfluktuasi, dari 7,27 persen (2013) meningkat di tahun berikutnya masing-masing 7,94 persen (2014); 8,68 persen (2015) dan turun menjadi 7,48 persen (2016), kemudian meningkat tajam menjadi 18,97 persen (2017).

Tabel 9. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto, Kabupaten Jeneponto 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.640,07	1.934,36	2.219,84	2.501,08	3.030,42
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.356,85	1.464,64	1.591,71	1.710,80	2.035,32
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	31,12	31,42	31,71	31,77	35,05
Pertumbuhan ¹¹ (%)	7,27	7,94	8,68	7,48	18,97

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Percepatan pertumbuhan PMTB dari tahun 2013 sampai 2017 ini berarti bahwa iklim investasi baik bangunan maupun non bangunan sedang berkembang. Pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2017 disebabkan adanya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Jeneponto yang cukup besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa PMTB ini berkembang sesuai dengan pola kebutuhan pembangunan.

¹⁰ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

**Tabel 10. Perkembangan Perubahan Inventori, Kabupaten Jeneponto
2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	110,22	166,67	120,34	108,75	70,13
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	102,48	140,12	147,95	71,22	30,93
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,09	2,71	1,72	1,38	0,81

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Pada tahun 2013 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 110,22 miliar rupiah, yang kemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 166,67 miliar rupiah. Pada tahun 2015-2017 perubahan inventori turun menjadi 120,34 miliar rupiah; 108,75 miliar rupiah; dan 70,13 miliar rupiah. Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Jeneponto

cenderung menurun. Pada tahun 2013, proporsi perubahan inventori adalah sebesar 2,09 persen, selanjutnya 2,71 persen (2014), 1,72 persen (2015), 1,38 persen (2016), dan 0,81 persen (2017).

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut.

Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar wilayah (dalam series PDRB atas dasar harga Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

**Tabel 11. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa, Kabupaten Jeneponto
2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.376,05	1.679,60	1.973,59	2.290,32	2.360,10
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.200,34	1.325,29	1.411,68	1.695,45	1.792,31
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	26,11	27,28	28,19	29,09	27,30
Pertumbuhan ¹² (%)	9,94	10,41	6,52	20,10	5,71

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor antar daerah menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di dalam daerah itu sendiri, tetapi dikonsumsi oleh daerah lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara total, dalam kurun waktu 2013-2017 nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Jeneponto terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai ekspor sebesar 1.376,05 miliar rupiah, meningkat menjadi sebesar 1.679,60 miliar rupiah (2014); 1.973,59 miliar rupiah (2015); 2.290,32 miliar rupiah (2016); dan 2.360,10 miliar rupiah (2017). Adapun kontribusi total nilai ekspor barang dan jasa terhadap PDRB memiliki tren yang cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sementara itu, nilai ekspor atas dasar harga konstan menunjukkan arah pertumbuhan yang positif dan fluktuatif, dengan nilai pertumbuhan masing-masing tahun sebesar 9,94 persen (2013); 10,41 persen (2014); 6,52 persen (2015), 20,10 persen (2016), dan 5,71 persen (2017).

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi daerah Kabupaten Jeneponto. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk dalam wilayah, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha.

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan barang dan jasa di wilayah ekonomi Kabupaten Jeneponto yang berasal dari luar daerah. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan ketergantungan Kabupaten Jeneponto terhadap ekonomi atau barang dan jasa daerah lain semakin meningkat.

Tabel 12. Perkembangan Impor Barang dan Jasa, Kabupaten Jeneponto 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Barang dan Jasa					
c. ADHB (Miliar Rp)	2.114,94	2.447,08	2.772,77	3.079,30	3.482,56
d. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.718,20	1.820,08	1.948,22	2.061,12	2.240,38
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	40,14	39,75	39,60	39,11	40,28
Pertumbuhan ¹³ (%)	5,35	5,93	7,04	5,79	8,70

Catatan: ^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2013-2017 nilai impor Kabupaten Jeneponto selalu menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013 nilai impor sebesar 2.114,94 miliar rupiah, meningkat menjadi sebesar 2.447,02 miliar rupiah (2014); 2.772,77 miliar rupiah (2015); 3.079,30 miliar rupiah (2016); dan 3.482,56 miliar rupiah (2017). Sementara itu, proporsi impor barang dan jasa cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 proporsi impor terhadap PDRB sebesar 40,14 persen. Di tahun berikutnya turun menjadi 39,75 persen (2014); 39,60 persen (2015); dan 39,11 persen (2016). Kemudian sedikit mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 40,28 persen. Di sisi lain, pertumbuhan riil nilai impor barang dan jasa menunjukkan arah pertumbuhan yang fluktuatif, dengan nilai pertumbuhan masing-masing tahun sebesar 5,35 persen (2013); 5,93 persen (2014); 7,04 persen (2015), 5,79 persen (2016), dan 8,70 persen (2017).

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

IV BAB IV
PENUTUP

<https://jenepontokab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013-2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Jeneponto pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013-2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Jeneponto terhadap ekonomi luar daerah.

V LAMPIRAN

<https://jenepontokab.bps.go.id>

**PDRB KAB JENEPONTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Komponen	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,500,048.38	3,970,412.38	4,489,317.26	4,979,135.41	5,504,458.05
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	1,988,896.89	2,239,440.76	2,536,960.72	2,857,405.56	3,165,755.89
1.b. Pakatan dan Alas Kaki	120,348.27	138,825.51	160,612.48	177,733.01	193,486.00
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	235,939.87	278,026.69	321,659.59	352,909.74	389,628.12
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	272,602.36	307,409.06	346,329.30	378,764.93	415,248.40
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	657,345.50	748,185.72	824,099.20	881,387.08	980,434.80
1.f. Hotel dan Restoran	73,078.41	85,421.67	100,319.86	110,887.60	119,308.00
1.g. Lainnya	151,837.08	173,102.95	199,336.11	220,047.50	240,596.84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	92,215.98	112,813.90	130,251.57	145,789.77	160,041.34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	665,750.54	739,095.52	840,625.02	927,007.70	1,002,432.52
3.a. Konsumsi Kolektif					
3.b. Konsumsi Individu					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,640,072.47	1,934,365.36	2,219,837.49	2,501,081.72	3,030,417.49
4.a. Bangunan	1,263,625.14	1,497,983.50	1,719,650.54	1,937,318.83	2,396,467.65
4.b. Non-Bangunan	376,447.33	436,381.86	500,186.95	563,762.89	633,949.84
5. Perubahan Inventori	110,220.61	166,672.58	120,343.48	108,747.05	70,131.69
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)					
6.a. Barang					
6.b. Jasa					
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)					
7.a. Barang					
7.b. Jasa					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(738,898.31)	(767,479.72)	(799,180.17)	(788,973.83)	(1,122,458.17)
8.a. Ekspor	1,376,047.03	1,679,601.20	1,973,587.48	2,290,323.34	2,360,098.09
8.b. Impor	2,114,945.34	2,447,080.92	2,772,767.65	3,079,297.17	3,482,556.26
PDRB	5,269,409.67	6,155,880.02	7,001,194.66	7,872,787.82	8,645,022.92

Keterangan

*) : Angka Sementara

**): Angka Sangat Sementara

**PDRB KAB JENEPONTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Komponen	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	2,817,441.97	2,977,764.74	3,148,721.58	3,337,244.53	3,557,227.27
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	1,540,421.74	1,624,517.23	1,713,085.91	1,817,509.17	1,942,163.93
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	99,846.53	105,339.66	111,038.54	117,286.34	124,287.82
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	214,508.24	232,981.85	250,996.00	265,047.90	281,377.63
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	228,805.79	241,047.39	253,340.81	266,350.51	283,164.56
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	553,931.99	582,959.09	617,411.97	657,005.99	700,567.95
1.f. Hotel dan Restoran	57,826.82	61,553.97	66,108.97	70,665.31	74,172.70
1.g. Lainnya	122,100.87	129,365.55	136,739.38	143,379.32	151,492.69
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	81,190.17	89,532.06	93,113.34	96,970.90	101,525.16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	582,793.95	596,367.21	640,961.35	661,216.10	690,246.59
3.a. Konsumsi Kolektif					
3.b. Konsumsi Individu					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,356,854.04	1,464,643.30	1,591,712.68	1,710,802.06	2,035,323.68
4.a. Bangunan	1,029,974.51	1,111,714.15	1,206,380.77	1,305,906.21	1,597,285.67
4.b. Non-Bangunan	326,879.53	352,929.16	385,331.92	404,895.86	438,038.01
5. Perubahan Inventori	102,481.47	140,125.45	147,946.54	71,222.08	30,931.61
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)					
6.a. Barang					
6.b. Jasa					
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)					
7.a. Barang					
7.b. Jasa					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(517,860.83)	(494,789.16)	(536,539.98)	(365,663.10)	(448,077.92)
8.a. Ekspor	1,200,336.46	1,325,286.37	1,411,680.10	1,695,452.12	1,792,305.86
8.b. Impor	1,718,197.29	1,820,075.53	1,948,220.08	2,061,115.21	2,240,383.78
PDRB	4,422,900.77	4,773,643.60	5,085,915.52	5,511,792.57	5,967,176.40

Keterangan

*) : Angka Sementara

**) : Angka Sangat Sementara

**DISTRIBUSI PDRB KAB JENEPONTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Komponen	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	66.42	64.50	64.12	63.24	63.67
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	37.74	36.38	36.24	36.29	36.62
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2.28	2.26	2.29	2.26	2.24
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4.48	4.52	4.59	4.48	4.51
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5.17	4.99	4.95	4.81	4.80
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	12.47	12.15	11.77	11.20	11.34
1.f. Hotel dan Restoran	1.39	1.39	1.43	1.41	1.38
1.g. Lainnya	2.88	2.81	2.85	2.80	2.78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1.75	1.83	1.86	1.85	1.85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	12.63	12.01	12.01	11.77	11.60
3.a. Konsumsi Kolektif					
3.b. Konsumsi Individu					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	31.12	31.42	31.71	31.77	35.05
4.a. Bangunan	23.98	24.33	24.56	24.61	27.72
4.b. Non-Bangunan	7.14	7.09	7.14	7.16	7.33
5. Perubahan Inventori	2.09	2.71	1.72	1.38	0.81
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)					
6.a. Barang					
6.b. Jasa					
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)					
7.a. Barang					
7.b. Jasa					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(14.02)	(12.47)	(11.41)	(10.02)	(12.98)
8.a. Ekspor	26.11	27.28	28.19	29.09	27.30
8.b. Impor	40.14	39.75	39.60	39.11	40.28
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan

*) : Angka Sementara

**) : Angka Sangat Sementara

**PERTUMBUHAN PDRB KAB JENEPONTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Komponen	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	12.82	13.44	13.07	10.91	10.55
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	15.09	12.60	13.29	12.63	10.79
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	9.14	15.35	15.69	10.66	8.86
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6.96	17.84	15.69	9.72	10.40
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	11.04	12.77	12.66	9.37	9.63
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10.12	13.82	10.15	6.95	11.24
1.f. Hotel dan Restoran	11.08	16.89	17.44	10.53	7.59
1.g. Lainnya	12.26	14.01	15.15	10.39	9.34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	15.64	22.34	15.46	11.93	9.78
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	10.01	11.02	13.74	10.28	8.14
3.a. Konsumsi Kolektif					
3.b. Konsumsi Individu					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	12.17	17.94	14.76	12.67	21.16
4.a. Bangunan	12.19	18.55	14.80	12.66	23.70
4.b. Non-Bangunan	12.12	15.92	14.62	12.71	12.45
5. Perubahan Inventori	3.45	51.22	(27.80)	(9.64)	(35.51)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)					
6.a. Barang					
6.b. Jasa					
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)					
7.a. Barang					
7.b. Jasa					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	16.26	3.87	4.13	(1.28)	42.27
8.a. Ekspor	11.61	22.06	17.50	16.05	3.05
8.b. Impor	13.19	15.70	13.31	11.06	13.10
PDRB	11.63	16.82	13.73	12.45	9.81

Keterangan

*) : Angka Sementara

**) : Angka Sangat Sementara

LAJU IMPLISIT PDRB KAB JENEPONTO
TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)

Komponen	Komponen				
	2,013	2,014	2,015	2,016	2,017
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)					
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	7.64	7.33	6.93	4.65	3.71
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	10.71	6.77	7.43	6.16	3.68
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5.19	9.34	9.76	4.76	2.73
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3.10	8.49	7.39	3.90	4.00
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4.54	7.04	7.19	4.02	3.12
1.f. Hotel dan Restoran	2.51	8.15	4.00	0.51	4.32
1.g. Lainnya	3.57	9.81	9.35	3.41	2.51
	8.95	7.60	8.94	5.28	3.48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	3.34	10.94	11.02	7.48	4.85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	5.02	8.49	5.82	6.90	3.59
3.a. Konsumsi Kolektif					-
3.b. Konsumsi Individu					-
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4.58	9.26	5.60	4.83	1.85
4.a. Bangunan	4.51	9.83	5.79	4.07	1.13
4.b. Non-Bangunan	4.79	7.36	4.98	7.26	3.94
5. Perubahan Inventori	5.46	10.59	(31.61)	87.71	48.49
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)					
6.a. Barang					
6.b. Jasa					
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)					
7.a. Barang					
7.b. Jasa					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	21.03	8.71	(3.97)	44.86	16.10
8.a. Ekspor	1.52	10.55	10.31	(3.37)	(2.52)
8.b. Impor	7.45	9.23	5.86	4.97	4.05
PDRB	4.68	8.24	6.75	3.76	1.43

Keterangan

*) : Angka Sementara

**): Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JENEPONTO**
JL. PELITA NO.58 BONTOSUNGGU
TELP: (0419) 22256 ; FAX: (0419) 22256
EMAIL: bps7304@bps.go.id